

IMPLEMENTASI PROGRAM *SMART VILLAGE*
(Studi di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran)

Skripsi

Oleh

ELSA MARDALENA
NPM 2116021001



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

IMPLEMENTASI PROGRAM *SMART VILLAGE*
(Studi di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten
Pesawaran)

Oleh

ELSA MARDALENA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung



JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM *SMART VILLAGE* (Studi di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)

OLEH

ELSA MARDALENA

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan program *Smart Village* sebagai upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Desa Hanura menjadi salah satu desa percontohan dalam program ini, yang sebelumnya menghadapi tantangan dalam pelayanan publik, pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan mobilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program *Smart Village* di Desa Hanura berdasarkan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi komunikasi, program telah disosialisasikan melalui berbagai media, namun masih terdapat hambatan dalam kejelasan dan konsistensi informasi kepada masyarakat. Pada aspek sumber daya, fasilitas teknologi tersedia namun keterbatasan anggaran dan kualitas SDM masih menjadi kendala. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang cukup baik meskipun motivasi perlu ditingkatkan melalui insentif. Struktur birokrasi menunjukkan adanya SOP yang belum sepenuhnya dipahami, serta fragmentasi koordinasi antar pelaksana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi program *Smart Village* di Desa Hanura telah berjalan dengan cukup baik, terutama dalam penyediaan teknologi dasar seperti situs web desa, layanan digital, dan ojek online lokal. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat, pelatihan SDM, dan alokasi anggaran yang lebih efektif. Program ini memiliki potensi besar dalam mendorong transformasi digital desa menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Smart Village*, Implementasi Kebijakan, Digitalisasi Desa

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE SMART VILLAGE PROGRAM (A Study in Hanura Village, Teluk Pandan District, Pesawaran Regency)

BY

ELSA MARDALENA

The development of information and communication technology (ICT) has prompted the government to implement the Smart Village program as an effort to accelerate rural development and improve community welfare. Hanura Village was selected as one of the pilot villages for this program, having previously faced challenges in public services, education, environmental issues, economic activities, and mobility. This study aims to analyze the implementation of the Smart Village program in Hanura Village using the policy implementation model proposed by George C. Edwards III, which includes the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results show that in terms of communication, the program has been socialized through various media; however, issues remain in the clarity and consistency of information delivered to the community. Regarding resources, technological facilities are available, but limited funding and human resource quality still pose challenges. The disposition of implementers demonstrates a fairly good level of commitment, although motivation needs to be enhanced through proper incentives. The bureaucratic structure indicates that standard operating procedures (SOPs) are not fully understood, and there is fragmentation in coordination among implementers. The study concludes that the implementation of the Smart Village program in Hanura Village has progressed reasonably well, particularly in providing basic technology such as the village website, digital services, and local online transportation. However, to achieve optimal results, there is a need to improve community participation, human resource training, and more effective budget allocation. The program holds significant potential to drive digital transformation in villages toward inclusive and sustainable development.

Keywords: Smart Village, Policy Implementation, Digitalization

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi

: **IMPLEMENTASI PROGRAM *SMART VILLAGE***
(Studi di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan,
Kabupaten Pesawaran)

Nama Mahasiswa

: **Elsa Mardalena**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2116021001**

Program Studi

: **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan

: **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**



Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M. IP

NIP. 197804302008121001

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**



Dr. Tabah Maryanah, S.I.P, M.Si.

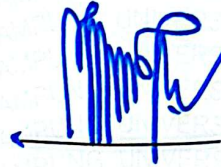
NIP 197106042003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Maulana Mukhlis, S.sos., M. IP**

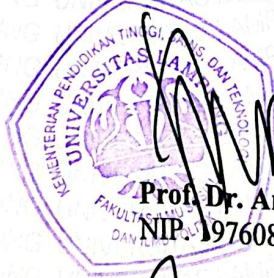


Penguji Utama

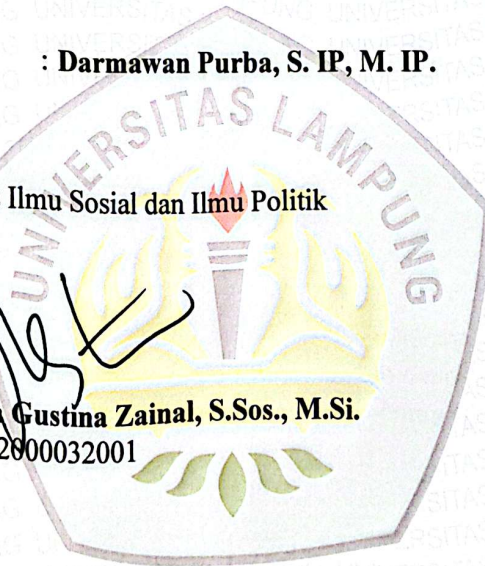
: **Darmawan Purba, S. IP, M. IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 Juni 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 Juni 2025
Yang Membuat Pernyataan



Elsa Mardalena
NPM 2116021001

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Elsa Mardalena, dilahirkan di Natar pada tanggal 23 mei 2003. Peneliti merupakan Putri kedua dari dua bersaudara dari bapak E. Novilawanto dan Ibu Sundari Magdalena. Peneliti memiliki satu orang kakak laki-laki. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Tunas Melati II Atas yang diselesaikan tahun 2008, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 4 Natar Atas tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 1 Natar pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAN 1 Natar pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021 Peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung.

MOTTO

Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.

(1 Korintus 10:13)

Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu!

(2 Tawarikh 15:7)

Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang

(Amsal 23:18)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah meridhai segala usaha hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Ku persembahkan tulisan sederhana ini teruntuk ...
Bapak, bunda dan kakak Tercinta

Terimakasih tak terhingga selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan dan motivasi. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Terimakasih Bapak dan bunda telah membuktikan kepada dunia bahwa anak seorang yang sederhana bisa menjadi sarjana.

Terimakasih untuk diri sendiri, Elsa Mardalena yang sudah mampu sekuat ini dan berjuang untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini

Terimakasih untuk keluarga besar “**Jurusan Ilmu Pemerintahan**” dan Almamater tercinta “**Universitas Lampung**”

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan anugrah-Nya yang telah memberikan kemampuan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Program *Smart Village* (Studi Di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran)”**. Dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekuarangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik.
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Ibu Prof. Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

8. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.I.P, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah banyak memberikan bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak bapak, semoga Tuhan Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan untuk bapak beserta keluarga.
9. Bapak Darmawan Purba, S.IP, M.IP. selaku Dosen Penguji Skripsi. Terima kasih atas masukan, saran dan bimbingannya selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih pak, semoga Tuhan Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan untuk bapak beserta keluarga.
10. Seluruh dosen beserta kakak alumni Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA terimakasih banyak untuk semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah penulis peroleh selama perjalanan di kampus dapat menjadi bekal untuk kehidupan penulis kedepannya.
11. Mba Sela dan Ibu Merta selaku staf Jurusan Ilmu Pemerintahan yang selalu membantu dalam hal administratif. Terimakasih atas kesabaran dan kesediannya selama ini.
12. Keluarga besar staff Desa Hanura yang telah membantu perizinan dan pelaksanaan penelitian.
13. Untuk keluargaku tercinta yaitu Bunda, Bapak dan Abang. Terima kasih banyak untuk segala doa yang telah dicurahkan untukku, baik dalam proses penelitian maupun yang lainnya, serta kerja kerasnya untuk menjadikan penulis insan yang berpendidikan tinggi dan bermanfaat bagi orang lain. Bersimpuh maaf atas kesalahan yang pernah penulis lakukan. Seluruh ilmu yang penulis dapat dari pendidikan semoga bermanfaat bagi orang lain dan dapat menjadi amal bagi bunda dan bapak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun bunda dan bapak berada, dan semoga keberhasilan dalam hidup senantiasa Tuhan Maha Esa berikan dalam hidupku agar diriku dapat terus menciptakan senyum bahagia di wajah Bunda dan Bapak tercinta.
14. Untuk sahabatku tercinta Sindi Kurniawati, Resha Amanda Putri, Indah Aulia Terima kasih telah menemani dan membersamai dalam segala hal dari awal

hingga akhir perkuliahan. Terima kasih atas segala suka dan duka di perkuliahan, serta dukungan yang telah diberikan. Maaf atas segala hal yang belum dapat dipenuhi. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang, dan semoga kita bisa sukses di masa depan dengan cara dan jalan kita masing-masing.

15. Untuk teman satu bimbingan ku yaitu Anisa, Nadira, Gianin. Terima kasih atas persahabatan, doa, dukungan serta kebersamaan selama proses perkuliahan. Semoga kita semua sukses. Aamiin.
16. Keluarga KKN Desa Tanjung Raja Giham Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, khususnya seketaris sekaligus teman sekamarku yaitu Mita Amelia. Terimakasih untuk pengalaman dan persaudaraan selama 40 hari.
17. Almamater Tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu, kenangan dan juga pembelajaran.
18. Teruntuk pemilik NRP 31180560700999 yang selalu menemani dan selalu menjadi *support system* penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Maupun bantuan dan senantiasanya sabar menghadapi saya, terimakasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dalam sanwacana ini. Penulis berharap semoga Tuhan Maha Esa membalas semua kebaikan yang diberikan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang politik dan pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 Juni 2025

Penulis,

Elsa Mardalena

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan	12
2.2. Teori Implementasi Kebijakan	13
2.3. Tinjauan <i>Smart village</i>	19
2.4. Unsur Unsur <i>Smart village</i>	20
2.5. Kerangka Pikir	23
III. METODE PENELITIAN	27
3.1. Tipe Penelitian	27
3.2. Lokasi Penelitian.....	28
3.3. Fokus Penelitian.....	29
3.4. Penentuan Informan	33
3.5. Jenis dan Sumber Data	33
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	34

3.7. Teknik Pengolahan Data	36
3.8. Teknik Analisis Data.....	37
3.9. Teknik Keabsahan Data	38
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1. Gambaran Umum Desa Hanura	39
4.1.1. Sejarah Singkat Desa Hanura.....	40
4.1.2. Struktur Pemerintahan Desa Hanura.....	41
4.2. Hasil dan Analisis Implementasi Program <i>Smart village</i> di Desa Hanura.....	42
4.2.1 Peran Komunikasi dalam Implementasi Program <i>Smart village</i> .	43
4.2.1.1 Dimensi Transmisi.....	43
4.2.1.2 Dimensi Kejelasan.....	50
4.2.1.3 Dimensi Konsistensi.....	54
4.2.2 Peran Sumber Daya dalam Implementasi Program <i>Smart village</i>	59
4.2.2.1. Sumber Daya Manusia.....	60
4.2.2.2. Sumber Daya Anggaran.....	68
4.2.2.3 Sumber Daya Fasilitas	74
4.2.2.4. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan	83
4.2.3 Peran Disposisi dalam Implementasi Program <i>Smart village</i>	96
4.2.3.1. Pengangkatan Pelaksana.....	96
4.2.3.2. Insentif	102
4.2.4 Peran Struktur Birokrasi dalam Implementasi Program <i>Smart village</i>	110
4.2.4.1. Standar Operasional Prosedur	110
4.2.4.2. Fragmentasi	118
4.3. Dampak Program <i>Smart village</i>	131
4.3.1. Dampak Pada Pelayanan Masyarakat	131
4.3.2. Dampak Ekonomi Yang Dihasilkan	132
V. KESIMPULAN DAN SARAN	136
5.1. Kesimpulan	136
5.2. Saran.....	137

DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN.....	141

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Status IDM Provinsi Lampung Tahun 2024	2
Tabel 2. Kondisi <i>Smart village</i> di Lampung	5
Tabel 3. Informan Penelitian.....	33
Tabel 4. Media Sosialisasi (Dimensi Transmisi)	49
Tabel 5. Kejelasan dan Konsistensi Informasi.....	58
Tabel 6. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Program <i>Smart village</i> di Desa Hanura.....	67
Tabel 7. Fasilitas Teknologi Pendukung <i>Smart village</i>	81
Tabel 8. Pengangkatan Pelaksana	101
Tabel 9. Pemberian Insentif	108
Tabel 10. Kejelasan <i>Standar Operasional Prosedur</i> (SOP)	116
Tabel 11. Koordinasi Antar Unit (Fragmentasi)	124
Tabel 12. Matriks Hasil Penelitian.....	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir	26
Gambar 2. Peta Desa Hanura	36
Gambar 3. struktur Organisasi Desa Hanura.....	42
Gambar 4. Daftar Hadir Rapat Dusun Desa Hanura	49
Gambar 5. Sosialisasi Mengenai Internet Desa.....	54
Gambar 6. Pelatihan dan Pengembangan Desa oleh Mahasiswa Universitas Lampung.....	62
Gambar 7. Pelatihan dan Pengembangan Desa oleh Mahasiswa Teknokrat Indonesia	62
Gambar 8. Penunjukan Operator Tingkat Desa Hanura	67
Gambar 9. Transparansi Anggaran Desa Hanura.....	71
Gambar 10. Tampilan Website Desa Hanura.....	76
Gambar 11. Layanan <i>E-Tapping</i> Desa Hanura	77
Gambar 12. Layanan Tosmart Desa Hanura	78
Gambar 13. Wifi Publik Desa Hanura	82
Gambar 14. Layanan Ojek Online Lokal Via Whatsapp Group	82
Gambar 15. Pelatihan IT Kepada Masyarakat Oleh Mahasiswa PKL	108
Gambar 16. Pelatihan Literasi Digital Se-Kecamatan Teluk Pandan	117
Gambar 17. Absensi Kantor Desa Hanura	117
Gambar 18. Koordinasi antar Pemerintah Desa dengan Mahasiswa Oleh Kepala Desa	124

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang pesat, memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara lebih optimal. Pemahaman yang mendalam mengenai potensi TIK serta standar yang diterapkan memungkinkan masyarakat untuk menggunakan teknologi komunikasi dengan lebih efektif, baik untuk kebutuhan pribadi maupun sosial. Kesadaran kolektif mengenai pentingnya literasi teknologi juga menjadi kunci dalam upaya mengurangi kesenjangan digital yang masih terjadi di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Diera ini, informasi dan komunikasi bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan telah menjadi kebutuhan mendasar yang setara dengan kebutuhan sandang dan pangan. Meskipun dalam beberapa dekade sebelumnya peran informasi kurang mendapat sorotan, saat ini kebutuhan akan akses informasi yang cepat dan akurat diakui sebagai elemen penting dalam kehidupan manusia modern (Ahmad, A. 2012:18).

TIK merupakan hasil penerapan prinsip-prinsip ilmiah di bidang komunikasi yang bertujuan untuk menciptakan produk material yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses komunikasi. Dalam perspektif yang lebih luas, teknologi informasi dan komunikasi dapat dipahami sebagai upaya penerapan prinsip-prinsip keilmuan melalui pengembangan alat-alat teknis yang dirancang untuk memperbaiki kualitas dan kinerja unsur-unsur komunikasi, seperti sumber informasi, pesan yang disampaikan, media yang digunakan, audiens yang dituju, serta dampak yang dihasilkan. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi tidak berdiri sendiri, melainkan beroperasi dalam sebuah sistem makro yang juga

mencakup teknologi elektronika dan teknologi informasi. Ketiganya berperan saling melengkapi dalam mendukung terciptanya sistem komunikasi yang lebih efisien, cepat, dan terarah, sehingga relevan dengan kebutuhan komunikasi modern yang semakin kompleks dan dinamis (Setiawan dalam Munti, N. Y. S., & Syaifuddin, D. A. 2020:10).

Melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Desa, termasuk desa adat atau dengan sebutan lain, merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pengelolaan ini didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal-usul, serta hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan unit sosial dan geografis yang memiliki karakteristik unik, terutama dalam kehidupan komunitas yang erat dan penuh kebersamaan. Biasanya, desa terletak di wilayah pedesaan dan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan tradisional. Dalam konteks sosial, desa mencerminkan interaksi antar warga yang didasari oleh nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong yang kuat menjadikannya pusat solidaritas dan kearifan lokal. Ekonomi desa yang bergantung pada sektor-sektor seperti pertanian dan kerajinan mencerminkan budaya setempat yang kaya dan beragam. Selain berperan sebagai pusat ekonomi, desa juga memiliki fungsi penting dalam melestarikan budaya dan tradisi, yang menjadikannya simbol identitas bagi masyarakatnya.

Tabel 1. Status IDM Provinsi Lampung Tahun 2024

No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Status IDM				
				Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
1	Lampung Selatan	17	256	0	1	165	90	0
2	Lampung Tengah	28	301	0	0	138	147	16

3	Lampung Utara	23	232	0	2	194	36	0
4	Lampung Barat	15	131	0	0	21	63	47
5	Tulang Bawang	15	147	0	3	107	33	4
6	Tanggaman us	20	299	0	3	220	76	0
7	Lampung Timur	24	264	0	4	160	96	4
8	Way Kanan	15	221	0	2	160	54	10
9	Pesawaran	11	144	0	0	103	31	10
10	Pringsewu	9	126	0	0	32	82	12
11	Mesuji	7	105	0	0	51	45	0
12	Tulang Bawang Barat	9	93	0	0	64	28	1
13	Pesisir Barat	11	116	0	14	79	22	1
JUMLAH		204	2435	0	38	1489	803	105

Sumber: Dinas PMDT, <https://dpmdt.lampungprov.go.id/>

Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung tahun 2022 total 2.435 desa dengan desa mandiri 105 desa, desa maju 803 desa, desa berkembang 1489 desa, desa tertinggal 38 desa, desa sangat tertinggal 0 desa. Dengan menggunakan ukuran indeks desa membangun (IDM), saat ini jumlah desa mandiri mencapai 105 desa atau 4,3% dari 2.435 desa Provinsi Lampung. Perlu lebih banyak desa di Indonesia yang menerapkan program *Smart village* guna mencapai kemandirian dan perkembangan desa yang lebih adaptif.

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kepmendesa PDTT) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Panduan Umum Pengembangan Desa Cerdas, ditetapkan bahwa pengembangan Desa Cerdas merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan pelayanan publik masyarakat desa melalui pemanfaatan teknologi digital secara partisipatif, inklusif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif, dengan mengacu pada enam pilar utama yaitu ekonomi cerdas, masyarakat cerdas, kehidupan cerdas, mobilitas cerdas, tata kelola pemerintahan cerdas, dan lingkungan cerdas, serta menekankan pentingnya Sistem Informasi Desa (SID), pendampingan, peningkatan kapasitas, ruang komunitas digital, jejaring, serta monitoring dan evaluasi untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa. Program *Smart village* merupakan inisiatif pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat desa terhadap hak-hak mereka, sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemerintahan sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksana *Smart village*. Selain itu, program ini menuntut akuntabilitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warganya. Meskipun memiliki kesamaan dengan konsep smart city, *Smart village* diterapkan dalam skala yang lebih kecil, yaitu di lingkungan desa, dan diimplementasikan melalui penggunaan teknologi informasi sebagai basis pengembangan (Holmes dalam Rangga, K. K. 2023:108).

Program *Smart village* di Indonesia dirancang dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui penggunaan teknologi informasi. Konsep ini menggabungkan tiga elemen utama yang saling berhubungan yaitu *smart government*, *smart community*, dan *smart environment*. Elemen smart government berfokus pada pengelolaan yang efisien dan transparan, dimana teknologi dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem administrasi dan pelayanan publik. Sementara itu, *smart community* mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa, sehingga mereka memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan arah perkembangan komunitas lokal. Elemen ketiga, *smart*

environment, menitikberatkan pada upaya pelestarian lingkungan melalui teknologi ramah lingkungan, seperti sistem energi terbarukan dan pengelolaan sampah yang lebih baik (Herdiana, D. 2019:16). Dengan mengintegrasikan ketiga elemen ini, program *Smart village* bertujuan untuk membangun “*smart relationship*”, yaitu hubungan yang konstruktif dan saling mendukung antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Program ini diharapkan mampu memperkuat kelembagaan masyarakat, memberdayakan individu, serta meningkatkan daya saing desa dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Herdiana, D. 2019:10).

Tabel 2. Kondisi *Smart village* di Lampung

No	Kabupaten/Kota	Kategori Data Wilayah OTDA			Jumlah Desa+Kelurahan	Desa Lokus
		Kecamatan	Desa	Kelurahan		
1	Lampung Barat	15	131	5	136	7
2	Tanggamus	20	299	3	302	7
3	Lampung Selatan	17	256	4	260	18
4	Lampung Timur	24	264	0	264	7
5	Lampung Tengah	28	301	10	311	31
6	Lampung Utara	23	232	15	247	4
7	Way Kanan	15	221	6	227	5
8	Tulang Bawang	15	147	4	151	15
9	Pesawaran	11	144	0	144	12
10	Pringsewu	9	126	5	131	11
11	Mesuji	7	105	0	105	0
12	Tulang Bawang Barat	9	93	3	96	4
13	Pesisir Barat	11	116	2	118	4
14	Bandar Lampung	20	0	126	126	0
15	Metro	5	0	22	22	0
JUMLAH		229	2.435	205	2.640	130

Sumber: Dinas PMDT , <https://dpmdt.lampungprov.go.id/>

Lampung merupakan salah satu provinsi yang sudah mulai menerapkan konsep *Smart village* sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksana *Smart village*. Provinsi Lampung memiliki jumlah desa 2.435. *Smart village* sebagai program pengembangan desa

seharusnya dilakukan di seluruh desa di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Pada tahun 2020 hanya 4 desa di Provinsi Lampung yang terpilih menjadi desa percontohan penerapan program ini, salah satunya Desa Hanura di Kabupaten Pesawaran (Ramadhani, S.L., dkk. 2023:20). Pada akhir tahun 2023, pengimplementasian program *Smart village* di Provinsi Lampung telah mencapai 97% (Kanafi, R.I.S. 2024:10).

Program *Smart village* mulai dilaksanakan di Desa Hanura pada tanggal 25 Maret 2021 (Rangga,K.K. 2023:160). Kondisi Desa Hanura yang menjadi perhatian sebelum diterapkannya *Smart village* seperti pelayanan publik yang masih konvensional, kurang transparan, dan lambatnya proses administrasi masyarakat. Permasalahan lingkungan seperti pencemaran sungai dan kebersihan. Permasalahan di bidang pendidikan seperti kurangnya akses pendidikan bagi masyarakat, kualitas pendidikan yang belum berbasis teknologi, dan minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi. Kemudian terdapat pula permasalahan ekonomi dimana pelaku perekonomian di Desa Hanura belum melek digital dan penjualan masih dilakukan secara konvensional. Selain itu juga terdapat permasalahan mobilitas penduduk dimana Go-Jek, Grab, Maxim, dan aplikasi ojek online lainnya belum masuk ke daerah Pesawaran, khususnya di Desa Hanura yang membuat sulitnya penduduk melakukan mobilitas. Secara idealis, apabila diterapkannya program *Smart village* maka akan terjadi *smart people, smart living, smart environment, smart government, smart mobility, smart economy* sesuai dengan unsur-unsur *Smart village*. Hal tersebut dikarenakan program ini dirancang untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rangga,K.K. 2023:160). Desa Hanura menunjukkan potensi yang signifikan dalam hal pemanfaatan teknologi, seperti adanya inovasi penyediaan fasilitas jaringan wifi publik yang dapat diakses oleh masyarakat secara bebas. Desa ini juga telah mengembangkan situs web resmi desa yang berfungsi sebagai platform untuk memudahkan penyebaran informasi serta meningkatkan interaksi antara pemerintah desa dan warganya. Selain itu, desa

ini juga memiliki layanan ojek online khusus penduduk Desa Hanura yang dapat diakses melalui grup WhatsApp (Ramadhani, S.L., dkk. 2023:20).

Dalam pengimplementasian program ini juga menemui beberapa hambatan, seperti keterbatasan anggaran. Keterbatasan ini dapat menghambat kelancaran fungsi konsep, seperti keharusan pemerintah desa mendorong kesuksesan program ini melalui berbagai kebijakan atau kegiatan, seperti pengadaan infrastruktur teknologi yang diperlukan, pelatihan sumber daya manusia, dan pengembangan aplikasi atau sistem yang dibutuhkan untuk menjalankan konsep *Smart village* secara efektif. Selain itu juga adanya resistensi masyarakat terhadap perubahan, terutama dalam hal adopsi teknologi baru. Masyarakat desa yang telah terbiasa dengan sistem manual seringkali mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem digital yang diperkenalkan melalui program *Smart village*. Seperti yang terjadi saat ini, dimana infrastruktur digital di Desa Hanura telah tersedia, namun yang menjadi tantangan utama dalam implementasi program *Smart village* adalah minimnya partisipasi aktif dari masyarakat. Sebagian warga masih menunjukkan sikap skeptis terhadap pemerintah desa, yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan program tersebut. (Maulana, dkk. 2022:14). Dilihat dari penjabaran sebelumnya, beberapa unsur *Smart village* sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Hanura, maka dari itu perlu adanya penelitian untuk memberikan penjelasan secara terperinci terkait bagaimana implementasi *Smart village* di Desa Hanura.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fatkhur Rokhman (2023) dengan judul “Implementasi Program *Smart village* Di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi” memberikan analisis tentang pengimplementasian program-program *Smart village* yang terdapat di Desa Suka Maju, salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Mengemukakan bahwa implementasi program *Smart village* di Desa Suka Maju telah berhasil mewujudkan berbagai pilar penting yang berkontribusi pada pembangunan desa yang lebih maju dan berkelanjutan.

Pilar *smart government* menciptakan sistem pemerintahan yang inovatif dalam pelayanan administrasi, didukung oleh infrastruktur dari pemerintah pusat. *Smart living* memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan air bersih yang dikelola oleh SPAM serta fasilitas pengelolaan sampah berbasis teknologi. *Smart mobility* meningkatkan akses telekomunikasi dengan dukungan jaringan yang luas, sementara *smart economy* mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia untuk mengembangkan UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. *Smart people*, melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, memainkan peran kunci dalam pengembangan sektor-sektor ini. Secara keseluruhan, program ini memberikan dampak positif signifikan bagi kehidupan masyarakat melalui penerapan konsep *Smart village*.

Kemudian terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Nanda Sahda Lestari (2023) dengan judul “Implementasi Program *Smart village* di Provinsi Lampung (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)” memberikan analisis tentang implementasi program *Smart village* di Provinsi Lampung dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Mengemukakan bahwa meskipun program telah diimplementasikan di 130 desa pada 2021 dengan dukungan anggaran sebesar 30 juta per desa, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi belum sepenuhnya tercapai. Program ini telah dirumuskan dengan tujuan yang jelas dan mendapatkan dukungan pemerintah serta kolaborasi antar lembaga. Namun, ada hambatan signifikan dalam penerapannya, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan partisipasi dari kelompok sasaran. Faktor penghambat lainnya termasuk rendahnya sumber daya manusia di desa, area yang masih mengalami *blank spot*, kurangnya kolaborasi antara kabupaten, dan terbatasnya ruang penyimpanan data. Meskipun demikian, organisasi pelaksana menunjukkan pemahaman yang baik dan tidak ada penolakan terhadap program.

Selain itu juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Agung Nurrahman (2022) dengan judul “Pengembangan Desa Sukapura Menuju Desa *Smart village*” memberikan analisis tentang pengembangan desa menuju *Smart village* di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, khususnya pada aspek *smart government*. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Mengemukakan bahwa pengembangan Desa Sukapura menuju *Smart village* masih menghadapi berbagai kendala dalam empat dimensi utama. Pada dimensi sumber daya, terdapat kemajuan berupa adaptasi perangkat desa terhadap perubahan dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Namun, pada dimensi teknologi, terdapat masalah signifikan, termasuk ketergantungan pada pihak eksternal dan server yang sering mengalami gangguan, yang memperlambat pelayanan publik. Dalam dimensi institusi, pengembangan *Smart village* belum didukung oleh regulasi atau master plan yang jelas, baik melalui Peraturan Daerah maupun Peraturan Desa. Meski pada dimensi keberlanjutan, pemerintah desa memiliki komitmen jangka panjang, namun tanpa *grand design* dan milestone yang jelas, perkembangan *Smart village* di Desa Sukapura masih belum optimal.

Kemudian terdapat penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani, S.L., dkk (2023) dengan judul “Manfaat Program *Smart village* di Desa Hanura Kabupaten Pesawaran Berdasarkan Persepsi Penduduk”, memberikan analisis tentang manfaat program *Smart village* di Desa Hanura Kabupaten Pesawaran berdasarkan persepsi penduduk. Menggunakan metode penelitian kuantitatif deduktif. Mengemukakan bahwa program-program *Smart village* yang dilakukan oleh pemerintah dinilai bermanfaat oleh penduduk Desa Hanura. Hal ini menjadi menarik karena artinya program *Smart village* di Desa Hanura dapat mewujudkan tujuan dilaksanakannya program tersebut.

Penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dari segi fokus penelitian, studi ini secara khusus mengkaji dampak implementasi program *Smart village* di Desa Hanura. Penelitian ini juga memiliki cakupan yang lebih spesifik dimana mengkaji implementasi program secara lebih mendalam, kemungkinan mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, sosial,

dan teknologi karena secara idealis, penerapan *Smart village* akan menghasilkan perkembangan desa mencakup beberapa aspek tersebut. Dengan demikian, berdasarkan uraian masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Program *Smart village* (Studi di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Program *Smart village* di Desa Hanura?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengimplementasian program *Smart village* di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

1.4. Manfaat Penelitian

a) Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan literatur tentang implementasi *Smart village* di Indonesia. Studi ini memperkaya pemahaman konseptual mengenai dampak digitalisasi di tingkat desa, khususnya dalam konteks Desa Hanura. Hasil penelitian dapat menjadi landasan untuk pengembangan teori dan model implementasi *Smart village* yang lebih efektif, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lokal yang mempengaruhi keberhasilan program. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada diskursus akademik tentang transformasi digital di daerah pedesaan dan implikasinya terhadap pembangunan berkelanjutan.

b) Manfaat praktis

Bagi Desa Hanura, hasil penelitian dapat menjadi evaluasi komprehensif atas implementasi program *Smart village*, membantu mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan, serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi program di masa depan.

Bagi masyarakat, penelitian ini meningkatkan kesadaran tentang manfaat dan tantangan dalam adopsi teknologi digital, serta dapat mendorong partisipasi aktif dalam program *Smart village*. Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap layanan publik dan peluang ekonomi. Bagi peneliti, penelitian ini menyediakan pengalaman praktis dalam mengevaluasi program pembangunan berbasis teknologi di tingkat desa, meningkatkan keterampilan analitis, dan membuka peluang untuk penelitian lanjutan dalam bidang ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan

Kata implementasi, menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksaan atau penerapan. Dengan demikian implementasi menurut arti kata harfiah adalah pelaksanaan sesuatu, sehingga implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan suatu kebijakan. Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa indonesia berarti pelaksanaan atau penepatan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Eugene Bardach, menyajikan gagasan yang cukup menarik bukunya "*The Implementation Game*", bahwa cukup sulit untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit untuk merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya memanjakan telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Lebih sulit lagi untuk melaksanakan program atau kebijakan dengan cara yang memuaskan seluruh masyarakat. Pressman dan Wildavsky (1973) telah menekankan bahwa implementasi harus mendapat perhatian dari semua elemen, kita keliru jika menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berlangsung secara mulus (dalam Kasmad, R).

Pressman dan Wildavsky (1973) telah menekankan bahwa implementasi harus mendapat perhatian dari semua elemen, kita keliru jika menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berlangsung secara mulus (dalam Kasmad, R).

Menurut Ripley dan Franklin, implementasi merupakan apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Sedangkan menurut Grindle, implementasi secara umum yaitu tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak suatu pemerintahan. Winarno, B (2016:133) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan publik harus diimplementasikan supaya dapat mengetahui dampak yang terjadi dan tujuan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan (dalam Wibowo. 2018:102).

Menurut pengertian di atas implementasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan setelah adanya perintah dari atasan yang dibentuk dalam suatu program tertulis dan telah disahkan serta dituangkan menjadi sebuah kegiatan dan memiliki suatu tujuan tertentu. Tindakan ini berusaha untuk menjadikan keputusan yang ditetapkan menjadi pola operasional. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan yang berarti membahas mengenai tujuan, sasaran, langkah-langkah, sumber daya, pihak ang terkait, kendala, dan evaluasi.

2.2. Teori Implementasi Kebijakan

George C. Edwards III (1980) dalam bukunya *"Implementing Public Policy"* berusaha untuk dapat melihat kebijakan diimplementasikan. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak memberikan solusi dari akar permasalahan sosial mungkin akan mengalami kegagalan meskipun dilakukan dengan sangat baik, begitupun sebaliknya. Menurutnya, untuk menjawab pertanyaan tersebut terdapat empat faktor yang bekerja secara simultan dan berkaitan antara satu sama lain, yaitu komunikasi, sumber-

sumber, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi (dalam Abdoellah, A.Y., & Rusfiana, Y. 2016).

1) Komunikasi

Dalam proses implementasi kebijakan, komunikasi memegang peranan penting karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi memainkan peran sentral dalam keberhasilan implementasi program *Smart village* di Desa Hanura. Keberhasilan program ini membutuhkan pemahaman yang jelas dari semua pelaksana terkait visi, tujuan, dan langkah-langkah pelaksanaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah, kepala desa, serta aparat terkait harus menyampaikan informasi program dengan jelas, akurat, dan konsisten kepada masyarakat dan pelaksana di lapangan. Jika pesan tidak tersampaikan dengan baik, misalnya informasi teknis mengenai teknologi yang digunakan dalam program *Smart village*, maka dapat terjadi kesalahpahaman yang menghambat pelaksanaan. Sebagai contoh, apabila sistem digital yang menjadi komponen program tidak dipahami masyarakat, maka implementasi program akan kurang efektif. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting) yaitu:

- a) Dimensi Transmisi (*transmission*), transmisi ini menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementor*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

- c) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2) Sumber Daya

Sumber daya meliputi staff yang memadai yang memiliki keahlian untuk melaksanakan tugas-tugas mereka memberikan informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) didalamnya untuk kepentingan pelayanan publik, serta secara maksimal dapat menerjemahkan keinginan-keinginan publik. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut:

- a) Sumber Daya Manusia (*Staff*). Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Implementasi kebijakan. Kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.
- b) Anggaran (*Budgetary*). Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan. Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa “*New towns studies suggest*

that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program". Menurut Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

- c) Fasilitas (*office*). Edward III dalam (Widodo, 2010:102) menyatakan bahwa Fasilitas atau sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam (Widodo, 2010:102), juga menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan.
- d) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority* juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

3) Disposisi

Disposisi dapat menjadi pendukung maupun penghambat dalam implementasi program *Smart village*. Sebagai administrator kebijakan unit organisasi, pemerintah membangun standar prosedur oprasional (SOP) untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya para pelaksana kerjakan. Standar prosedur oprasional kadang-kadang lebih menghambat dibandingkan membantu implementasi kebijakan. Sedangkan Faktor- faktor yang turut juga untuk memberhasilkan implementasi mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a) Pengangkatan pelaksana, Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat. Karena itu pengangkatan dan

pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

- b) Insentif, merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4) Struktur Birokrasi

Kemudian dalam struktur birokrasi juga terdapat hambatan seperti fragmentasi. Fragmentasi dapat berupa tekanan dari luar unit birokrasi, komite legislaif, interest group, pejabat eksekutif, dan lainnya. Mereka selalu menghambat implementasi kebijakan, melakukan pemborosan sumber daya, melakukan tindakan yang tidak diharapkan, menghambat koordinasi karena proses implementasi kebijakan yang berbeda dan berlawanan arah dan inilah sebab terjadinya kegagalan implementasi dari sebuah kebijakan publik.

a) *Standard Operational Prosedur (SOP):*

Menurut Winarno (2005:150) "*Standard Operational Prosedur (SOP)* merupakan perkembangan dari tuntutan inside akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, framework dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan

yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Namun berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe- tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

b) Fragmentasi

Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan- keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward III, 1980).

Dalam penelitian Implementasi Program *Smart village* (Studi di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran) ini, teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana implementasi program *Smart village* di Desa Hanura. Teori ini peneliti pilih karena mampu memberikan kerangka analisis yang komprehensif melalui empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Dengan menggunakan teori Edwrds, penelitian ini dapat secara sistematis menganalisis proses implementasi, mulai dari pemahaman

aktor pelaksana hingga bagaimana struktur birokrasi mendukung atau menghambat implementasi program *Smart village* di Desa Hanura.

2.3. Tinjauan *Smart village*

Konsep *Smart village* tidak bisa dilepaskan dari konsep *smart city* dikarenakan konsep *Smart village* merupakan turunan dari *smart city*. Hal ini dirasa perlu dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada alasan bahwa desa sebagai unit pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia juga memerlukan pembaharuan dan adaptasi dengan teknologi informasi mengingat perkembangan teknologi semakin pesat beberapa tahun terakhir. Konsep *Smart village* sejatinya adalah upaya integrasi teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat pedesaan dalam berbagai aspek sehingga menghasilkan manfaat yang berkelanjutan antara teknologi dan masyarakat desa agar menciptakan lingkungan dan pelayanan desa yang efisien dan efektif (Herdiana, D. 2019:6).

Definisi *Smart village* dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang para ahli. Menurut Ramachandra, dkk (2015:14) *Smart village* merupakan sebuah desa yang mampu mencukupi kebutuhan sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain (mandiri) dengan memberdayakan sumber manusia yang ada yaitu pemuda desa melalui pengembangan sumber daya alam lokal yang tersedia dan penggunaan teknologi (dalam Kusdarini, dkk. 2020:9). Sedangkan menurut Chatterje dan Kar (2017:52), *Smart village* adalah sebuah desa yang menyediakan kumpulan layanan kepada masyarakat atau penduduknya yang ramah terhadap bisnis warga dan bertindak sebagai penyedia bagi para pelaku ekonomi di desa dan menyediakan semua layanan yang diperlukan warga desa dengan cara yang lebih efektif dan efisien dengan bantuan TIK (dalam Baru, V.P., dkk. 2019:16). Menurut Wiswanadham (2010:10) *Smart village* sebagai sebuah layanan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan aktivitas desa yang dikelola oleh masyarakat desa secara efektif dan efisien (Kharisma, I. 2024).

Dari pengertian-pengertian yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa *Smart village* adalah sebuah konsep pengembangan kepada

masyarakat lokal untuk mengembangkan potensi dan menyelesaikan masalah yang ada secara cerdas dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, dan daya saing ekonomi.

2.4. Unsur-Unsur *Smart village*

Adapun unsur-unsur *Smart village* adalah sebagai berikut Rokhaman, F. (2023:23):

a) *Smart People*

Smart People dapat diartikan sebagai masyarakat cerdas, masyarakat memiliki peranan penting dalam mewujudkan *Smart village* didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup. Hal tersebut didukung dengan keterampilan masyarakat dan juga memiliki partisipasi tinggi dalam mewujudkan *Smart village*. Adanya penyediaan kemampuan teknologi kepada masyarakat tidak serta merta menerjemahkan sebuah masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas. Setiap orang harus di didik dan dilatih untuk menggunakan dan mengeksplorasi kemampuan teknologi untuk menghasilkan dan memproduksi nilai dari sumber daya mereka. Pada titik inilah dapat diklasifikasikan sebagai masyarakat cerdas.

Smart people, masyarakat pedesaan menjadi penentu apakah bisa diterapkan atau tidaknya *Smart village*, masyarakat perlu memiliki kesadaran dan memahami betul kebutuhannya sendiri, seperti dalam halnya berdemokrasi, masyarakat harus ikut aktif berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan pengembangan desa, sehingga feedback yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Tetapi bila melihat pada realitas yang ada literasi politik di Indonesia sangatlah mengkhawatirkan, masyarakat menjadi lebih apatis dikarenakan literasi politik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ini juga ditunjukkan dengan munculnya *money politics*, masyarakat cenderung acuh tak acuh dan berorientasi pada uang. Dalam konteks *Smart village* tentu hal seperti itu tidak diperbolehkan ada,

masyarakat diharapkan paham tentang literasi politik juga literasi media, masyarakat harus memiliki sikap keterbukaan dengan adanya proses seleksi informasi yang tepat.

b) Smart Government

Smart government dapat di artikan pemerintahan yang cerdas, terbuka, dan partisipatif. Hal sangat identik dengan penerapan *E-Government* merupakan suatu proses pelayanan dan mengelolah pemerintahan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronika. Tujuan *E-Government* penerapan ini upaya sistem pemerintahan lebih transparan, efisien, dan efektif. Pelayanan publik dilakukan secara terpusat, sistem pelayanan sudah berintegrasi. Dengan mudahnya mengakses layanan secara efektif.

Manfaat terkait pemerintahan yang cerdas, aparatur yang dibentuk oleh pemerintah dapat mempercepat sebuah inovasi. Pemerintah bisa menjembatani kesenjangan digital yaitu distribusi sumber daya digital yang tidak merata. Melalui suatu aparatur dan kolaborasi, sumber daya dapat dengan mudah dibagikan. Anggota masyarakat juga dapat dilatih dan memperoleh pengetahuan untuk mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan melalui teknologi untuk keuntungan sosial ekonomi baik bagi bisnis maupun masyarakat yang lebih besar. Adanya pemanfaatan teknologi informasi menjadikan proses pembinaan dan pemberdayaan menjadi proses yang tidak lagi dilakukan secara tradisional. Teknologi informasi menjadi media bersama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk saling menemukan masalah, tuntutan, dan keinginan masing-masing. Di sisi lain, teknologi informasi dapat dijadikan agenda pengembangan dalam pembinaan dan pemberdayaan sebagai bagian produktivitas masyarakat untuk menciptakan pemberdayaan masyarakat.

c) Smart Economy

Smart economy mendorong perkembangan ekonomi melalui industri kreatif berbasis digital dengan memanfaatkan media sosial sebagai market place, pemanfaatan melalui pemasaran media sosial sangat efektif

dikarenakan produk atau jasa dapat menjangkau secara global. Tentunya perlu adanya kerja sama yang baik terhadap pemerintahan desa. Kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintahan untuk menarik investor dengan cara meningkatkan daya tarik desa hal tersebut bisa menciptakan lapangan kerja baru. Pengembangan sosial ekonomi dalam pemerintah yang cerdas memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi biaya. Keberhasilan ini membutuhkan dedikasi, insentif, visi, dan kepemimpinan pemerintah. Misalnya wi-fi gratis dapat digunakan sebagai alat penting dalam menghubungkan bisnis wirausaha dan pemerintah lokal dengan mendukung transaksi bisnis. Selain itu investasi swasta kewirausahaan memainkan peran penting dalam memastikan ekonomi masyarakat yang kuat dan cerdas.

d) *Smart Environment*

Smart environment bertujuan untuk mengatasi masalah yang terkait lingkungan meliputi sanitasi, sampah plastik, *global warming*, ketersediaan ruang publik yang ramah anak, dan sebagainya. Ada beberapa aktivitas yang menopang keseimbangan lingkungan yaitu menjaga keasrian lingkungan, mempertahankan kearifan lokal, menjaga kelestarian Sumber Daya Alam (SDA). Lingkungan perdesaan dalam tatanan sosial terdiri dari adat, budaya dan struktur sosial. Dikaitkan dengan konteks *Smart village*, maka pemanfaatan teknologi informasi dapat diterapkan baik dalam tataran lingkungan sosial maupun dalam tataran lingkungan alam.

Dalam tataran sosial, pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan untuk mengembangkan dan memperkuat nilai adat, budaya dan struktur sosial yang ada. Teknologi informasi juga digunakan untuk mengkreasikan nilai adat dan budaya agar lebih bisa dikontekstualisasikan dengan keadaan saat ini tanpa menghilangkan esensi dari adat dan budaya tersebut. Adanya pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dalam konteks tatanan sosial di desa, maka akan menciptakan kelestarian struktur sosial yang selama ini ada. Konteks *smart environment* dalam tatanan alam dapat digunakan dalam

identifikasi potensi alam serta pemanfaatan alam yang lestari dan berkelanjutan. Seperti pemanfaatan teknologi informasi bidang pertanian berupa tersedianya informasi pertanian yang tepat waktu dan relevan bagi petani di desa agar para petani dapat menentukan rencana pola tani, pemanfaatan teknologi tersebut pada akhirnya selain akan meningkatkan keterampilan para petani, juga akan meningkatkan produktivitas pertanian yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

e) *Smart Mobility*

Smart mobility ialah memiliki peranan penting dalam kelangsungan hidup, pemanfaatan sistem transportasi dan didukung akses teknologi yang baik yang terkait elektronik, komputer, dan telekomunikasi dengan penggunaan yang bijak hal tersebut memberikan dampak baik terhadap masyarakat dengan memberikan kemudahan baik dari segi waktu, dan biaya.

f) *Smart Living*

Smart living ialah upaya dalam mendukung tujuan kesejahteraan yang difokuskan pada investasi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sosial budaya. Pemaparan terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan didorong oleh pemerintah cerdas untuk menciptakan lingkungan dimana baik inovator maupun pengguna menjadi sadar akan suatu alat yang mereka miliki. Masalah kesadaran tentang berbagai dampak negatif yang melekat pada teknologi sangat penting untuk membangun pemerintah cerdas. Kurangnya kesadaran tentang masalah dunia maya meningkatkan potensi bahaya bagi pengguna dan juga menghambat dampak positif yang dimaksudkan oleh pemerintah cerdas.

2.5. Kerangka Pikir

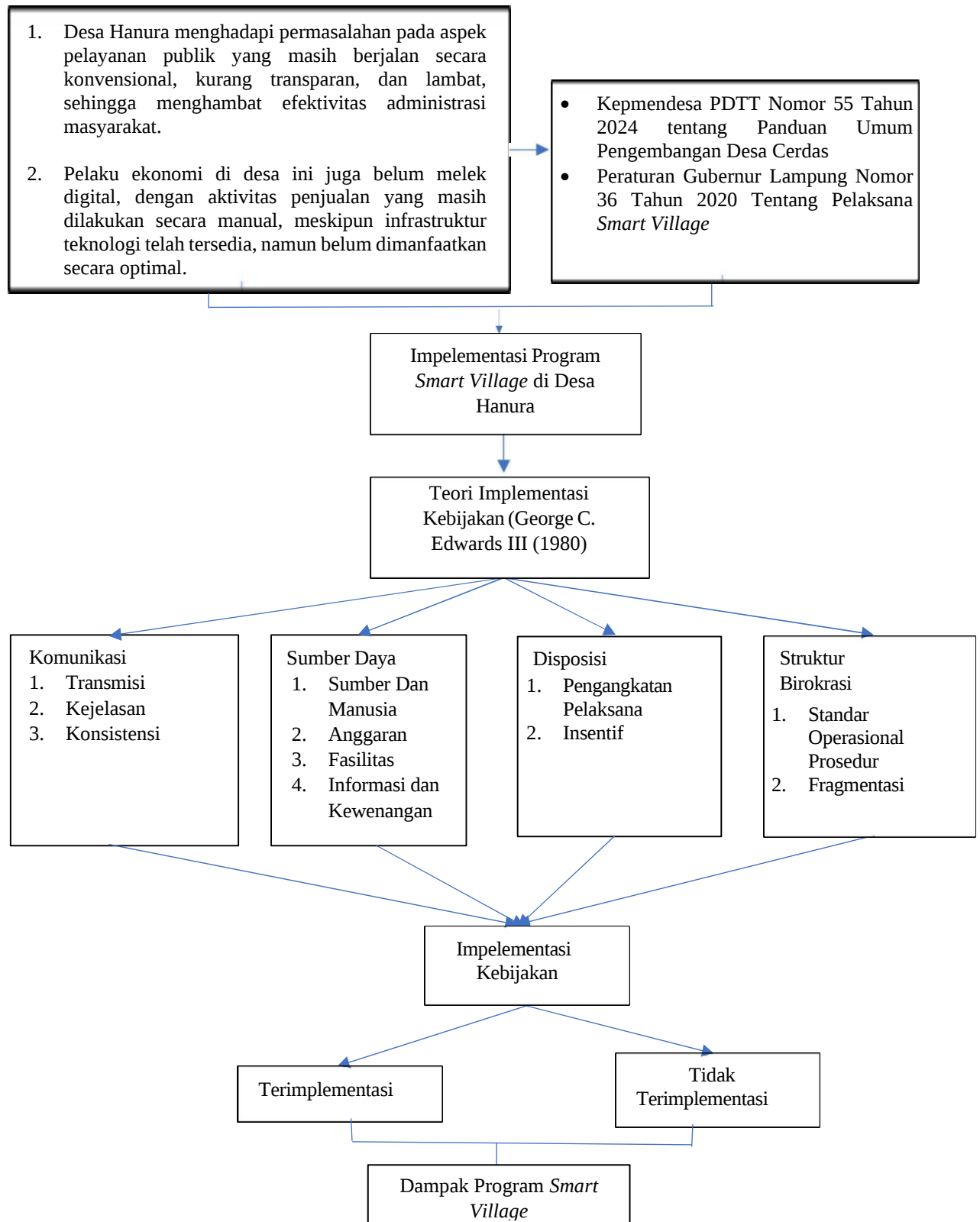
Sebelum diterapkannya program *Smart village*, Desa Hanura di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan tersebut mencakup pelayanan publik yang masih dilakukan secara konvensional, kurang transparan, dan lambat proses

administrasi. Selain itu, kondisi lingkungan desa juga memperlihatkan adanya pencemaran sungai serta rendahnya kesadaran akan pentingnya kebersihan. Dalam bidang pendidikan, masyarakat dihadapkan pada minimnya akses pendidikan, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, serta lemahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi. Sementara itu, pada sektor ekonomi, aktivitas usaha masyarakat masih bersifat tradisional dengan minimnya kemampuan digital dan pemasaran yang masih konvensional. Di sisi lain, keterbatasan mobilitas masyarakat juga menjadi isu, mengingat layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Go-Jek, Grab, atau Maxim belum tersedia di wilayah tersebut, yang menyebabkan aksesibilitas warga menjadi terhambat.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menerapkan program *Smart village* melalui Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020. Program ini mulai dilaksanakan di Desa Hanura pada tanggal 25 Maret 2021 dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Konsep *Smart village* sendiri terdiri atas enam unsur utama, yaitu *smart government*, *smart environment*, *smart economy*, *smart people*, *smart living*, dan *smart mobility*. Implementasi program ini diharapkan mampu memperbaiki sistem pemerintahan desa yang lebih transparan dan efisien, memberdayakan masyarakat melalui peningkatan literasi digital, menciptakan peluang ekonomi baru, serta meningkatkan kualitas lingkungan dan pelayanan publik. Di Desa Hanura, beberapa perubahan telah terlihat, seperti tersedianya WiFi publik, pengembangan situs web resmi desa, hingga inisiatif transportasi lokal berbasis grup WhatsApp. Meski demikian, implementasi program ini tidak lepas dari tantangan, seperti keterbatasan anggaran, resistensi terhadap perubahan teknologi, serta kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program *Smart village* di Desa Hanura secara mendalam, dengan fokus pada bagaimana proses pelaksanaan program, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan hasilnya. Untuk mendukung analisis tersebut, digunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III (1980) yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan

sangat bergantung pada empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi berperan dalam memastikan informasi kebijakan disampaikan secara jelas dan dipahami oleh pelaksana serta masyarakat. Sumber daya mencakup ketersediaan anggaran, infrastruktur, serta kompetensi sumber daya manusia yang menjalankan kebijakan. Disposisi mencerminkan sikap dan komitmen para pelaksana dalam mendukung suksesnya program. Sementara struktur birokrasi mengacu pada sistem organisasi dan koordinasi yang mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana kebijakan *Smart village* dijalankan di Desa Hanura dan sejauh mana kebijakan ini dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan desa di era digital.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber. Diolah oleh Peneliti (2025).

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Menurut Sugiyono (2020:10), metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini merupakan pendekatan post positivistik dan interpretatif, karena memfokuskan pada interpretasi data yang dikumpulkan dalam lingkup yang kreatif dan tidak terlalu terpola. Menurut Sugiyono (2020:15), metodologi kualitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian pada situasi alami dimana peneliti adalah alat utama. Data dikumpulkan dengan menggunakan triangulasi dan analisis data bersifat induktif. Hasil penelitian menekankan makna dan lebih spesifik daripada generalisasi.

Menurut Anselm dan Juliet (2003:37), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang memfokuskan pada pemahaman makna dan melalui interpretasi data, menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai melalui prosedur statistik atau cara pengukuran lain. Penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan luas mengenai realitas sosial melalui sudut pandang partisipan. Hasil penelitian berupa pengetahuan umum dan abstrak tentang fakta-fakta yang ditemukan melalui analisis realitas sosial subjek utama.

Bogdan & Biklen (1992:7) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk pernyataan atau tulisan dan perilaku dari orang yang diamati. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang dalam dan komprehensif tentang pernyataan, tulisan, dan perilaku seseorang, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam lingkungan konteks yang dikaji. Tujuan dari

penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman umum tentang kenyataan sosial dari perspektif partisipan, yang tidak ditentukan sebelumnya, tetapi ditemukan melalui analisis kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:39) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Alasan peneliti memilih penelitian kualitatif dalam skripsi berjudul Implementasi Program *Smart Village* di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran karena peneliti ingin memahami keadaan yang sebenarnya di lapangan. Penelitian kualitatif cocok untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pemahaman masyarakat yang tidak bisa diukur dengan angka saja. Dalam mempelajari pelaksanaan program *Smart Village*, peneliti ingin melihat bagaimana program ini berjalan, bagaimana idealnya program ini diimplementasikan di Desa Hanura. Dengan pendekatan ini, peneliti bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap dan sesuai dengan keadaan nyata, sehingga hasil penelitian ini dapat lebih tepat dan bermakna bagi pembaca.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penulisan proposal ini penulis melakukan penelitian di desa hanura, kecamatan teluk pandan, kabupaten pesawaran. Alasan memilih Desa Hanura sebagai lokasi penelitian adalah karena desa ini merupakan salah satu wilayah yang menerapkan program *Smart Village* di Kabupaten Pesawaran. Dengan memilih Desa Hanura, peneliti dapat secara langsung mengamati bagaimana implementasi program tersebut. Secara idealis untuk melihat perubahan di

Desa Hanura, karena apabila program ini sudah diimplementasikan dengan baik akan menghasilkan *six smart indicator Smart Village*.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Spradley dalam Sugiyono (2020:318) menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian, Fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, luasnya ruang lingkup penelitian, termasuk juga hal hal yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian memberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya. Fokus penelitian ini sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian yaitu menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi program *Smart Village* di Desa Hanura. Dengan bantuan teori yang relevan untuk melihat implementasi kebijakan yaitu Teori George C. Edwards III. Antara lain:

1. Komunikasi

Komunikasi memainkan peran sentral dalam keberhasilan implementasi program di desa Hanura. Keberhasilan program ini membutuhkan pemahaman yang jelas dari semua pelaksana terkait visi, tujuan, dan langkah-langkah pelaksanaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah, kepala desa, serta aparat terkait harus menyampaikan informasi program dengan jelas, akurat, dan konsisten kepada masyarakat dan pelaksana di lapangan. Jika pesan tidak tersampaikan dengan baik, misalnya informasi teknis mengenai teknologi yang digunakan dalam program, maka dapat terjadi kesalah pahaman yang menghambat pelaksanaan program.

a) Dimensi Transmisi

Penelitian menilai bagaimana informasi terkait program *Smart Village* disampaikan kepada pelaksana dan masyarakat, apakah informasi kebijakan dan teknis program *Smart Village*

disampaikan secara efektif kepada pelaksana dan masyarakat dan sarana komunikasi seperti rapat, sosialisasi atau media digital sudah digunakan secara optimal atau tidak untuk digunakan menjangkau target sasaran.

b) Dimensi kejelasan

Penelitian mengukur sejauh mana informasi kebijakan dan teknis program *Smart Village* dipahami oleh semua pihak terkait apakah pesan yang disampaikan sudah jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan konteks lokal masyarakat Desa Hanura, oleh karena itu aparat desa memastikan bahwa masyarakat memahami tujuan, dan manfaat program *Smart Village* apakah terdapat kesalahan persepsi ditingkat pelaksana maupun masyarakat.

c) Dimensi konsisten

Peneliti berusaha menganalisis konsistensi dan penyampaian informasi kebijakan dari pihak yang terlibat bagaimana koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam menjaga keselarasan selama implementasi program, apakah terdapat perubahan informasi atau intruksi yang membuat kesalahpahaman antara pelaksana maupun masyarakat.

2. Sumber Daya

Sumber daya meliputi staff yang memadai yang memiliki keahlian untuk melaksanakan tugas-tugas mereka memberikan informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan, kewenangan untuk menyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu dan berbagai fasilitas didalamnya untuk kepentingan pelayanan publik, serta secara maksimal dapat menerjemahkan keinginan-keinginan publik. Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan.

a) Sumber Daya Manusia (staff)

Penelitian menilai kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi program, apakah staff yang terlibat memiliki kompetensi, pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mendukung implementasi dan kesiapan aparat desa dalam memahami dan menjalankan program tersebut.

b) Dimensi Anggaran

Penelitian anggaran dalam mendukung pelaksanaan program apakah anggaran yang tersedia cukup untuk membiayai semua komponen program dan termasuk mekanisme pengelolaan anggaran untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.

c) Dimensi Fasilitas

Penelitian melihat bagaimana ketersediaan fasilitas yang mendukung implementasi program *Smart Village*, apakah infrastruktur digital seperti kualitas yang digunakan untuk menunjang implementasi program, apakah terdapat hambatan terkait penyediaan atau pemeliharaan fasilitas yang digunakan.

d) Dimensi Informasi Dan Kewenangan

Penelitian melihat ketersediaan dan kualitas informasi yang diperlukan untuk mendukung implementasi program dan informasi yang relevan tentang program *Smart Village* tersedia dan dapat diakses oleh semua pihak. Peneliti melihat bagaimana menganalisis kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dan pelaksana dan menjalankan program, kewenangan yang diberikan apakah hubungan koordinasi dan hambatan dalam pengambilan keputusan terkait implementasi program.

3. Disposisi

Struktur birokrasi yang ada dapat menjadi pendukung maupun penghambat dalam implementasi program sebagai kebijakan unit organisasi dalam menangani tugas rutin sebagaimana biasanya para pelaksana.

a) Dimensi Pengangkatan Pelaksana

Peneliti berusaha melihat bagaimana proses pemilihan dan penempatan pelaksanaan kebijakan yang terlibat dalam program *Smart Village* apakah pelaksanaan yang ditunjuk memiliki dedikasi dan kompetensi untuk mendukung implementasi termasuk keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat.

b) Dimensi Insentif

Penelitian melihat bagaimana peran insentif dalam mendorong motivasi dan kinerja pelaksanaan program, apakah insentif yang diberikan kepada pelaksana cukup untuk mendorong komitmen dan keberlangsungan program, dan bagaimana bentuk insentif yang diberikan, baik berupa finansial maupun non-finsial.

4. Sikap pelaksana

Kemudian dalam struktur birokrasi juga terdapat hambatan seperti fragmentasi. Fragmentasi dapat berupa tekanan dari luar unit birokrasi, mereka selalu menghambat implementasi kebijakan, melakukan pemborosan sumber daya, melakukan tindakan yang tidak diharapkan, menghambat koordinasi karena proses implementasi kebijakan yang berbeda dan berlawanan arah dan ilmiah sebab terjadinya kegagalan implementasi dari sebuah kebijakan.

a) Dimensi Standar Operasional Prosedur (SOP)

Peneliti berusaha melihat bagaimana peran (SOP) dalam membentuk sikap pelaksanaan kebijakan. Apakah (SOP) yang digunakan dalam pelaksanaan program sudah jelas dan sesuai dengan kebutuhan program *Smart Village* dalam melihat tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaksanaan terhadap (SOP) yang ditetapkan.

b) Dimensi Fragmentasi

Peneliti berusaha melihat bagaimana fragmentasi dalam struktur pelaksanaan yang mempengaruhi koordinasi dan efektivitas program, apakah tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program sudah terdefinisi atau terdapat hambatan.

3.4. Penentuan Informan

Teknik pengumpulan data dalam studi kasus umumnya melibatkan wawancara, observasi, dan analisis arsip. Sugiyono (2019) menekankan penggunaan teknik *Purposive Sampling* dalam pemilihan informan, di mana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan spesifik, seperti pengetahuan atau otoritas yang dimiliki terkait topik penelitian (Warsono, *et.al* 2022). Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memahami objek atau situasi sosial yang diteliti dengan lebih efektif, menggunakan pemahaman interpretatif untuk menggali makna dan konteks dari fenomena yang diteliti. Penelitian memfokuskan informan pada *stakeholder* dilingkup Desa Hanura.

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Jabatan	Informan	Lokasi
1	Kepala Desa Hanura	Rio Remotra	Desa Hanura
2	Sekretaris Desa Hanura	Yudi Aprianto	Desa Hanura
3	Bendahara Desa Hanura	Indri	Desa Hanura
4	Masyarakat	Hartono	Desa Hanura
5	Masyarakat	Murni	Desa Hanura
6	Masyarakat	Yurni	Desa Hanura

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

3.5. Jenis dan Sumber Data

Data primer dalam penelitian kualitatif terdiri dari kata-kata dan tindakan, sementara data sekunder adalah dokumen dan sejenisnya. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui sumber data primer dan sumber data sekunder, dimana sumber data primer memberikan data secara langsung dan sumber data sekunder memberikan data tidak langsung, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Sumber data ini dapat diklasifikasikan sebagai jenis-jenis data, yaitu:

a) Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung, data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan kepada informan yang berhubungan dengan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini yaitu data mengenai

implementasi *Smart Village* dari aspek program, organisasi pelaksanaan, dan kelompok sasaran serta kendalanya.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah dan menyajikan. Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dengan cara data dari buku-buku, karya-karya, jurnal, internet, literatur, dan dokumentasi terkait objek penelitian. Data sekunder pada penelitian ini berupa materi *Smart Village*, dokumen yang membahas program desa pintar, manfaat digitalisasi desa, serta evaluasi dampak sosial- ekonomi program serupa di Indonesia dan daerah lainnya turut dijadikan referensi dalam penelitian ini. Data-data ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis dan informasi kontekstual dalam menganalisis dampak program *Smart Village* di Desa Hanura.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Informasi yang diperoleh dengan menggunakan suatu metode diolah dan dianalisis untuk mencapai tujuan penelitian yaitu dengan menghasilkan data yang relevan. Dalam hal ini, metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan peneliti untuk melakukan pengamatan langsung terhadap hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan, waktu, lokasi, aktivitas, peristiwa, objek dan tujuan. Observasi menjadi fondasi dari semua ilmu pengetahuan. Melalui observasi, peneliti dapat mempelajari perilaku dan makna dari perilaku tersebut Sugiyono (2020). Salah satu observasi yang digunakan adalah observasi partisipan yang terjadi ketika orang yang melakukan observasi juga berperan atau berada di dalam situasi yang diamati. Sebaliknya, jika orang yang melakukan observasi tidak terlibat sama sekali dalam aktivitas

yang diamati, maka disebut sebagai observasi non- partisipan. Dalam penelitian ini, pendekatan observasi partisipan dipakai oleh peneliti untuk melihat kejadian di lapangan secara alami, peneliti melakukan observasi pada tanggal 5 febuari sampai dengan 11 febuari 2025. dengan cara mengunjungi lokasi studi yaitu desa hanura, kecamatan teluk pandan, kabupaten pesawaran dan salah satu desa lokus program *Smart Village* Provinsi Lampung. Observasi dilakukan pada program *Smart Village*, organisasi pelaksana, dan kelompok sasarannya untuk memahami dampak implementasi *Smart Village* dari segi program, organisasi pelaksana, dan sasarannya.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk percakapan yang sengaja dilakukan oleh dua pihak, pewawancara dan responden, untuk memperoleh informasi. Menurut Sugiyono (2020:137), wawancara adalah proses tanya jawab antara pewawancara dan responden yang dilakukan melalui panduan wawancara. Peneliti melakukan wawancara tak terstruktur dengan aparat desa, seperti kepala desa hanura, sekretaris desa hanura dan tim *Smart Village*. alasan peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur adalah untuk membangun hubungan baik dengan responden, sehingga membuat mereka merasa nyaman dan tidak merasa tertekan untuk menutup-nutupi informasi. Tujuannya agar jawaban yang didapatkan lebih alami dan tidak dipengaruhi oleh pewawancara. Dalam wawancara, peneliti mencatat hasil dengan menggunakan buku dan alat tulis. Penelitian ini melakukan wawancara pada hari rabu, 5 febuari 2025 pada pukul 11:00 WIB. peneliti melakukan wawanacara untuk memperoleh informasi tentang program *Smart Village*, mulai dari apakah sudah sesuai dengan rencana, kebijakan yang diambil dalam pembentukannya, bagaimana pelaksanaan program oleh organisasi, dan apakah kelompok sasaran yang ditujukan sudah tepat. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan data tentang implementasi program dan mengetahui kendala yang terjadi selama proses penerapannya.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara peneliti mengumpulkan data melalui analisis dokumen seperti peraturan, buku, surat, majalah, catatan rapat, dan catatan harian. Dalam memperoleh informasi, peneliti mempertimbangkan tiga sumber informasi: orang, tempat, dan tulisan. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan benda-benda tertulis seperti dokumen, handphone untuk merekam, dan buku untuk mencatat hal-hal penting. Peneliti sendiri berperan sebagai instrumen pengumpulan data melalui metode dokumentasi, dan menggunakan perekam gambar atau foto sebagai alat bantu. Dalam penelitian ini hasil dokumentasi meliputi, dokumentasi tampilan website Desa Hanura, layanan *E-Tapping* Desa Hanura, layanan Tosmart Desa Hanura.

3.7. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

a) Editing Data

Editing adalah proses memeriksa dan memperbaiki data yang sudah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk menghapus kesalahan dalam data dan menambahkan apa yang kurang. Proses editing melibatkan hal-hal seperti kelengkapan pengisian, kejelasan tulisan, kejelasan makna, konsistensi dan kesesuaian jawaban, relevansi jawaban, dan keseragaman data.

b) Interpretasi Data

Interpretasi data adalah proses untuk memahami makna dari data yang diperoleh dan membuat kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Setelah data dikumpulkan dan dalam proses edit, peneliti menggabungkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu menganalisis dan membahasnya untuk memperoleh kesimpulan akhir.

3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Hardani (2020:146), pendekatan kualitatif sangat berbeda dengan pendekatan kuantitatif dalam menyajikan data. Miles dan Huberman (1992:150), psikolog perkembangan dan ahli pendidikan, menyatakan bahwa analisis kualitatif data dikumpulkan melalui pengamatan terlibat, wawancara, dan lain-lain serta diproses menjadi kata-kata dalam teks yang diperluas. Analisis kualitatif terbagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan menurut Miles dan Huberman (1992:154) ketiga alur tersebut yaitu:

a) Reduksi Data

Analisis data melibatkan tahap reduksi, yaitu proses pembersihan, pengkategorian, pengarahannya, penghapusan data yang tidak perlu, dan pengaturan ulang data sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat diverifikasi. Reduksi data mempermudah dan mentransformasikan data kualitatif melalui proses seleksi ketat, ringkasan, penggolongan data dalam pola yang lebih luas, dan lain-lain (Hardani dkk. 2020:206).

b) Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah tata letak informasi yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk teks naratif adalah penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif di masa lalu, tetapi tidak teratur, berantakan, dan berlebihan (Hardani dkk. 2020:212).

c) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal masih sementara dan dapat berubah bila tidak didukung oleh bukti yang kuat. Namun, jika didukung oleh bukti valid dan konsisten saat pengumpulan data berikutnya, maka kesimpulan tersebut kredibel (Hardani dkk. 2020:217). Penarikan kesimpulan adalah bagian integral dari proses penelitian, di mana kesimpulan terus-menerus diverifikasi seiring berjalannya penelitian. Makna yang muncul dari data

harus diuji untuk kebenaran, konsistensi, dan relevansi, sehingga kesimpulan yang diperoleh berkualitas dan memiliki kegunaan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan adalah penemuan baru yang sebelumnya tidak diketahui. Temuan dapat berupa deskripsi objek yang sebelumnya samar, hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Hardani dkk. 2020:223).

3.9. Teknik Keabsahan Data

Menurut Sugiyono dalam (Nurfajriani, dkk. (2024), Triangulasi metode merupakan suatu teknik pengujian validitas data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sumber yang sama menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda. Dalam implementasinya, peneliti menerapkan minimal tiga teknik pengumpulan data utama, yaitu pengamatan langsung di lapangan untuk mengamati fenomena yang diteliti, mendalami dengan sumber atau penelitian, serta untuk mengumpulkan bukti-bukti. Data yang diperoleh dari ketiga teknik tersebut kemudian, dibandingkan, dan secara keseluruhan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas data penelitian dengan melakukan *cross-check* antar teknik pengumpulan data, sehingga dapat meminimalkan bias dan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas hasil penelitian mereka. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam memvalidasi temuan, tetapi juga memperkuat integritas keseluruhan proses penelitian kualitatif, memungkinkan hasil yang lebih dapat diandalkan dan bermakna dalam kontribusinya terhadap pengetahuan ilmiah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program *Smart village* di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ini telah menunjukkan kemajuan signifikan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam program sudah terbangun melalui media digital dan pertemuan warga, namun belum merata. Masih terdapat kesenjangan pemahaman, terutama di kalangan masyarakat yang belum familiar dengan teknologi, sehingga menyebabkan kurangnya keterlibatan dalam program.
2. Sumber daya, baik dari segi SDM maupun infrastruktur, telah tersedia namun belum sepenuhnya optimal. Pemerintah desa telah menyediakan fasilitas seperti Wi-Fi publik dan website desa, namun keterbatasan anggaran dan kurangnya pelatihan membuat pemanfaatan teknologi belum maksimal.
3. Disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan komitmen yang tinggi dari aparat desa dalam menjalankan program. Namun, masih terdapat resistensi dari sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya menerima transformasi digital, sehingga menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan.
4. Struktur birokrasi sudah mendukung melalui penyusunan SOP dan pembagian tugas, namun kurangnya koordinasi antar aktor pelaksana dan belum adanya *masterplan* jangka panjang menyebabkan program belum berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi program *Smart village* di Desa Hanura telah membawa dampak positif terhadap pelayanan publik dan akses informasi. Meskipun demikian, masih dibutuhkan upaya lanjutan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan efektivitas program secara menyeluruh.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Literasi Digital dan Kapasitas SDM

Pemerintah desa perlu menyelenggarakan pelatihan rutin mengenai penggunaan teknologi informasi, baik bagi perangkat desa maupun masyarakat umum, guna meningkatkan efektivitas penggunaan layanan digital desa.

2. Perluasan Sosialisasi dan Edukasi Program

Komunikasi program perlu diperluas secara menyeluruh dan inklusif, dengan menggunakan pendekatan yang beragam seperti penyuluhan langsung, media cetak, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat, agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3. Optimalisasi Anggaran dan Sumber Pendanaan Alternatif

Pemerintah desa dapat melakukan penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, CSR perusahaan, maupun lembaga nonpemerintah untuk mendukung kebutuhan anggaran program *Smart village* secara berkelanjutan.

4. Penyusunan Perencanaan Strategis Jangka Panjang

Diperlukan penyusunan *roadmap* atau masterplan pengembangan *Smart village* yang disepakati bersama, agar implementasi program menjadi lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

5. Penguatan Partisipasi dan Kepemilikan Program oleh Masyarakat

Perlu dibentuk forum partisipatif antara masyarakat dan pemerintah desa yang dapat menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi, evaluasi, dan inovasi bersama dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan keberlanjutan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2012). Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi: akar revolusi dan berbagai standarnya. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 13(1), 137-149.
- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik Alfabeta CV.
- Anselm, Strauss dan Juliet, Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Pustaka Belajar Yogyakarta.
- Baru, V. P., dkk. (2019). Tahap Pengembangan Smart Kampung di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Planoeath*, 4(2), 68-80.
- Hasibuan, M. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Askara.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Helaludin, & Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Makassar.
- Herdiana, D. (2019). Pengembangan Konsep *Smart village* bagi Desa-Desa di Indonesia. *Jurnal IPTEK KOM*, 21(1).
- Hudayana, B., Kutaneegara, P. M., Setiadi, S., Indiyanto, A., Fauzanafi, Z., Nugraheni, Kanafi, R. I. S. (2024). Pemprov Lampung targetkan 100 persen desa terapkan "*Smart village*". *Antaraneews.com*. Diakses pada pukul 20.55.
- Kharisma, I. (2024). *Implementasi Konsep Smart village di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*. Universitas Islam Sulthan Agung Semarang.
- Kusdarini, dkk. (2020). *Smart village* sebagai Upaya Penguatan Kapasitas Pemerintahan Nagari. *Universitas Andalas*, 27(1), 35-42.
- Lestari, N. S. (2023). *Implementasi Program Smart village di Provinsi Lampung (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)*. Universitas Lampung.
- M. D. F., & Yusuf, M. (2019). *Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul*. *Bakti Budaya*, 2(2), 3.
- Maharani, Y., & Sulisto, E. B. (2020). Pengaruh Penerapan *Smart village* terhadap Pembangunan di Pekon Suka Negeri Jaya Kecamatan Talang Padang. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 3(6).

- Maulana, S., Kagungan, D., & Prihantika, I. (2022). Sinergitas Pelaksanaan Program *Smart village* di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Administrativa*, 4(1), 101-113.
- Munti, N. Y. S., & Syaifuddin, D. A. (2020). Analisa dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(2).
- Nurrahman, A. (2022). Pengembangan Desa Sukapura Menuju Desa *Smart village*. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 89-109.
- Ramadhani, S. L., dkk. (2023). Manfaat Program *Smart village* di Desa Hanura Kabupaten Pesawaran berdasarkan Persepsi Penduduk. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(1), 50-60.
- Rangga, K. K. (2023). Manfaat Program *Smart village* di Desa Hanura Kabupaten Pesawaran berdasarkan Persepsi Penduduk. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(1), 41-50.
- Rokhman, F. (2023). Implementasi Program *Smart village* di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. PT Alfabet.
- Wibowo, S. A. (2018). Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang). Universitas Brawijaya.
- Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Panduan Umum Pengembangan Desa Cerdas
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksana *Smart village*